

PERANAN AMERIKA SERIKAT PASCA DEKOLONISASI DI NEGARA-NEGARA KAWASAN PASIFIC SELATAN

Oleh:

Terry Irenewaty
(UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA)
email: terryirenewaty32@gmail.com

ABSTRAK

Negara-negara di kawasan Pasific Selatan yang dahulu dijajah oleh Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman dan Australia, kini sebagian telah menjadi negara-negara merdeka. Sebagai negara yang baru merdeka, mereka belum mampu untuk berdiri sendiri. Sebenarnya mereka mempunyai potensi kekayaan alam dan kekayaan laut, namun belum dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut karena mereka tidak mempunyai kemampuan teknologi. Oleh sebab itu mereka sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari negara asing. Dengan demikian kehadiran negara-negara asing seperti Amerika Serikat, Cina, Uni Soviet dan Jepang ikut mempengaruhi negara-negara di Kawasan Pasific Selatan. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap latar belakang dan pengaruh Amerika Serikat di negara-negara Pasific Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah kritis. Dalam menganalisis data, langkah yang ditempuh adalah langkah-langkah menurut Kuntowijoyo, Pemilihan topik, Heuristik, Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi, Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Uni Soviet dan Cina di Pasific selatan menggugah Amerika Serikat untuk lebih memperhatikan kawasan ini, dengan lebih meningkatkan peranannya di Kawasan Pasific Selatan. Adapun peranan Amerika Serikat di Kawasan Pasific Selatan meliputi bidang ekonomi, politik dan strategi. Dalam bidang ekonomi Amerika Serikat memberikan bantuan dan memperbaiki taraf hidup mereka. Dalam bidang politik dan strategi, Amerika Serikat bersama-sama Australia dan Selandia Baru yang terikat dalam pakta pertahanan ANZUS berusaha untuk membendung masuknya pengaruh komunis yang datang dari Uni Soviet dan Cina.

Kata Kunci: Amerika Serikat, dekolonisasi, dan negara-negara Pasific Selatan

A. Pendahuluan

Antara tahun 1960-1970an, banyak negara-negara Pasific Selatan yang mengalami perubahan status politik dari negara jajahan menjadi negara-negara pulau yang merdeka. Perubahan status politik ini adalah akibat suatu proses dekolonisasi terutama di pulau-pulau yang mempunyai potensi untuk menjadi negara bangsa di Pasific. Proses dekolonisasi di kawasan ini sejalan dengan dekolonisasi dunia sejak PBB menetapkan deklarasi mengenai dekolonisasi pada tahun 1960 yang menuntut penghapusan penjajahan dunia.

Bersamaan dengan proses dekolonisasi ini, negara-negara Pasific berusaha untuk membentuk suatu kesatuan politik bagi masyarakat Pasific melalui integrasi bangsa. Negara-negara yang merdeka ini telah mendirikan organisasi-organisasi Regional yaitu Komisi Pasific Selatan dan Forum Pasific Selatan. Komisi Pasific Selatan didirikan berdasarkan persetujuan Canberra pada tahun 1947 oleh Belanda,

Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Sedangkan Forum Pasific Selatan didirikan pada tanggal 5 Agustus 1971 oleh Australia dan Selandia Baru serta beberapa negara merdeka (Departemen Penerangan RI, 1985: 5).

Semangat Regionalisme tampaknya kuat sekali, sehingga masyarakat Pasific Selatan tidak mengalami kesulitan untuk menentukan identitas kawasannya. Namun demikian tidak bisa diingkari, bahwa negara-negara ini masih sulit berdiri sendiri, karena keterbatasan kemampuan mereka. Masalah utamanya adalah kesulitan ekonomi, rendahnya taraf hidup mereka, pendidikan yang tertinggal, tekanan penduduk, masalah urbanisasi dan pengangguran. Timbul kekecewaan mereka bahwa sumber daya baik manusia maupun material menghambat mereka untuk memenuhi harapan-harapan akibat kontak dengan teknologi dan kebudayaan yang lebih sophisticated (Ronald Nangoi, 1982: 729).

Mereka secara potensial memang mempunyai kekayaan alam yaitu mineral dasar laut, perikanan dan bahan-bahan tambang seperti emas, nikel dan fosfat. Kemajuan teknologi akan mempermudah penggarapan potensi sumber-sumber tersebut, namun ternyata negara-negara Pasific Selatan belum mampu memanfaatkannya, padahal negara-negara maju tidak dapat dielakkan lagi kemampuan teknologinya dan mereka sangat membutuhkan sumber-sumber daya alam ini.

Dalam perkembangannya kawasan Pasific Selatan menjadi kawasan yang penting dan tidak dapat diabaikan. Sementara itu, keterbatasan kemampuan dari negara-negara di wilayah ini untuk berdiri sendiri, membuat mereka banyak bergantung pada dunia luar. Hal ini semakin mendorong negara-negara untuk ikut terlibat dalam perkembangan negara-negara Pasific.

Kehadiran negara-negara lain di kawasan Pasific Selatan ini adalah suatu bukti bahwa kawasan ini merupakan kawasan penting di dunia Internasional. Negara-negara asing yang sangat berkepentingan di kawasan ini adalah Amerikat Serikat, Perancis, Jepang, Uni Soviet, Cina (Ronald Nangoi, 1982: 731).

Perhatian Amerika Serikat atas perkembangan negara-negara Pasific Selatan tidak begitu benar dibandingkan dengan perhatiannya atas negara-negara dunia ketiga lainnya. Namun demikian tidak berarti bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak berkepentingan di kawasan Pasific Selatan ini, seperti yang terlihat

dari kehadirannya di Kepulauan Mikronesia. Bagi Amerika Serikat kepulauan ini mempunyai arti strategis bagi pertahanannya.

Kepulauan Mikronesia merupakan pangkalan persenjataan nuklir dan Angkatan Laut Amerika yang besar. Mikronesia tengah dijadikan batu loncatan untuk rencana Amerika Serikat menjalankan perang bintang. Makin menghebatnya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan ini mengundang peningkatan persenjataan pihak lawan sehingga mendorong adanya tingkat konfrontasi (Merdeka, 20 Juli 1987). Berdasarkan atas latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah untuk penelitian ini sebagai berikut: bagaimana posisi geografis negara-negara kawasan Pasific Selatan; mengapa negara-negara luar sangat berambisi untuk melibatkan diri di kawasan ini; dalam bentuk apa negara-negara luar melibatkan diri dalam perkembangan negara-negara di kawasan ini; apa latar belakang Amerika Serikat turut melibatkan diri dalam perkembangan negara-negara di kawasan ini; dan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Amerika Serikat di negara-negara kawasan Pasific Selatan.

Menurut Sumaryo Suryokusumo di dalam Jurnal Luar Negeri No. 4 yang diselenggarakan dan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembang Departemen Luar Negeri. Sejak PBB menentukan bahwa wilayah-wilayah di Pasific Selatan yang tidak berperintahan sendiri dimasukkan ke dalam program dekolonisasi PBB dalam tahun 1960, maka penguasa administrasi wilayah-wilayah tersebut, seperti Australia dan Selandia Baru, mulai didesak oleh negara-negara Asia Afrika khususnya untuk segera menentukan target penentuan nasib sendiri bagi mereka ke arah tercapainya kemerdekaan nasional. Sejak itu banyak wilayah-wilayah yang telah memperoleh kemerdekaan mereka atau sekurang-kurangnya telah mempunyai pemerintahan sendiri, seperti Samoa Barat, Fiji, Kiribati, Nauru, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Papua Nugini (PNG), Kepulauan Cook dan Niui. Lebih dari itu banyak diantaranya yang telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun demikian masih banyak wilayah-wilayah yang belum memperoleh kemerdekaan atau setidaknya wilayah-wilayah tersebut dianggap masih sebagai wilayah seberang, seperti anggapan Perancis terhadap wilayah Polinesia dan New Caledonia. Di samping itu ada juga wilayah-wilayah yang masih di bawah sistem perwalian, seperti Kepulauan Pasific, yang sebagian besar terletak

dalam kelompok kepulauan Micronesia, yang dinyatakan sebagai “wilayah strategis” yang diletakkan di bawah pengawasan negara besar seperti Amerika Serikat dan yang didasarkan atas persetujuan tersendiri.

Negara-negara di Pasific Selatan ini, kecuali Australia dan Selandia Baru, kebanyakan terdiri dari negara-negara kepulauan kecil yang beribu-ribu jumlahnya yang di dalam perkembangan sekarang masih mencari identitas masing-masing dalam membentuk kesatuan politik di kawasan ini yang bisa diperhitungkan dalam percaturan politik internasional. Walaupun merupakan negara-negara berkembang dan kebanyakan sudah merdeka, mereka masih mempunyai ikatan yang erat sekali dengan negara-negara metropolitan bekas penguasa administrasi masing-masing. Ini tercermin di dalam pola-pola administrasi dan struktur pemerintahan mereka yang masih mengikuti Australia dan Selandia Baru. Itu pula sebabnya negara-negara di kawasan ini masih bersikap membatasi diri dalam bergabung dengan negara-negara berkembang lainnya dalam gerakan Non Blok, kecuali Vanuatu.

Menurut pengalaman historis dalam perang dunia kedua, kawasan Pasific Selatan ini memang terlihat sebagai kawasan yang strategis. Karena itu tidak mustahil bahwa kawasan ini sekarang mulai merupakan ajang persaingan dan pertentangan ruang lingkup pengaruh dalam rangka politik global Super Power. Kondisi perekonomian di negara-negara kawasan ini masih sangat tergantung dari subsidi yang diberikan oleh bekas penguasa administrasi masing-masing dalam rangka membantu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi mereka. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi mereka, negara-negara di kawasan tersebut sangat mengharapkan bantuan dari luar negeri, khususnya dalam mengadakan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial mereka.

B. Metode Penelitian

Dari sekian banyak subyek penelitian, peneliti tertarik pada topik Pengaruh Amerika Serikat di negara-negara kawasan Pasific Selatan. Topik tersebut sangat perlu untuk diteliti mengingat sekitar 1960-1970an banyak negara-negara di Pasific Selatan yang memproklamasikan kemerdekaannya. Negara-negara di Pasific Selatan ini telah berusaha untuk membentuk satu kesatuan politik bagi masyarakat Pasific Selatan melalui integrasi bangsa. Negara-negara yang merdeka ini telah mendirikan organisasi-organisasi regional yaitu Komisi Pasific Selatan. Semangat Regionalisme

tampaknya kuat sekali, sehingga masyarakat Pasific Selatan tidak mengalami kesulitan untuk menentukan identitas kawasannya. Namun demikian tidak bisa diingkari, bahwa negara-negara ini masih sulit berdiri sendiri, karena keterbatasan kemampuan mereka. Oleh karena itu mereka sangat bergantung pada bantuan-bantuan negara-negar luar, sehingga mendorong negara luar untuk terlibat dalam perkembangannya.

Metode penelitian berasal dari kata *method* dalam bahasa inggris yang berarti jalan atau cara. Secara estimologi, metode adalah masalah yang menguraikan tentang cara-cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan secara teknis (Lorens Bagus, 1966: 635). Penelitian sejarah pada dasarnya terikat pada prosedur metode sejarah. Metode sejarah sendiri merupakan aturan serta prinsip sistematis dalam menpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif dan menilainya secara kritis yang dibuat dalam bentuk tulisan. Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2005: 91).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Dekolonisasi Negara-negara Pasific Selatan

Pasific Selatan meliputi beberapa negaramerdeka seperti Fiji, Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Samoa Barat, Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Negara-negara yang masih berada di bawah pengawasan Selandia Baru yaitu: Kepulauan Cook dan Nieu, serta negara-negara koloni misalnya Samoa Amerika (Amerika Serikat), Polonesia, Kaledonia Baru, Wallis dan Futuna (Perancis), Tokelau (Selandia Baru) dan Kepulauan Pitcairn (Inggris) (J.Kusmanto Anggoro, 1987: 160). Sejak dekade 1960an, beberapa pulau dan kepulauan jajahan Eropa di Pasific Selatan mengalami perubahan status politik dari status dijajah menjadi negara-negara pulau yang merdeka, dan beberapa diantaranya telah diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebelumnya hampir seluruh wilayah di kawasan itu merupakan jajahan negara-negara Barat, seperti Inggris, Perancis, Jerman Barat, Spanyol, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru.

Perubahan status politik ini adalah akibat suatu proses dekolonisasi terutama di pulau-pulau yang mempunyai potensi untuk menjadi negara-bangsa di Pasific Selatan. Dalam tahun 1960an Samoa Barat memperoleh kemerdekaan dari Selandia

Baru (1 Januari 1962). Namun dari PBB dan Australia (30 Januari 1968), kemudian pada tahun 1970an Tonga memperoleh kemerdekaan dari Inggris (4 Juni 1970), Fiji dari Inggris (10 Oktober 1979), Papua Nugini dari Australia (16 September 1975), Tuvalu dari Inggris (1 Oktober 1978), Kepulauan Solomon dari Inggris (7 Juli 1978) dan Karibia dari Inggris (12 Juli 1979) (Ronald Nangoi, 1982: 727).

Dalam tahun 1980an dua wilayah memperoleh kemerdekaan yaitu Vanuatu (sebelumnya New Hebrides) dari Perancis dan Inggris (30 Juli 1980) dan Belau (sebelumnya Pulau-Pulau) dari Amerika Serikat (29 Januari 1982). Kemerdekaan Vanuatu rupanya mempengaruhi kepulauan-kepulauan tetangganya, terutama Kaledonia Baru, yang masih merupakan jajahan Perancis. Dewasa ini penduduk asli Melanesia menuntut kemerdekaan bagi Kaledonia Baru sebelum tahun 1985. Pada tahun 1979, kelompok pro kemerdekaan "Kanak Independence Front", meminta Forum Pasific Selatan untuk mendesak Komisi PBB tentang dekolonisasi agar mendaftarkan Kaledonia Baru sebagai wilayah non otonom, sehingga memenuhi syarat bagi dekolonisasi. Tetapi Perancis tidak bersedia melepaskannya, karena kemerdekaan Kaledonia Baru akan merugikan kepentingannya di negara itu dan juga di kawasan Pasific Selatan.

Dekolonisasi di Pasific Selatan berlangsung sejalan dengan proses dekolonisasi di dunia sejak PBB menetapkan deklarasi mengenai dekolonisasi pada tahun 1960 yang menuntut penghapusan penjajahan di dunia. Beberapa negara pulau yang telah merdeka memberi dukungan yang kuat kepada kepulauan tetangganya yang masih dijajah untuk memperoleh kemerdekaan melalui PBB. Status mereka sebagai anggota PBB memungkinkan mereka untuk memperjuangkan nasib negara-negara tetangga. Negara-negara Pasific Selatan yang telah menjadi anggota PBB adalah: Fiji (13 Oktober 1979), Papua Nugini (10 Oktober 1975), Samoa (15 Desember 1976), Kepulauan Solomon (19 September 1978) dan Vanuatu. Papua Nugini tampaknya memanfaatkan status keanggotaannya di PBB untuk memberi suara bagi kemerdekaan pulau-pulau Pasific Selatan.

Proses dekolonisasi di kawasan ini berjalan dengan baik, karena negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru (kecuali Perancis) rela melepaskan negara-negara jajahannya. Mereka ingin melindungi citra mereka sebagai negara-negara demokrasi dan selain itu negara-negara jajahan ini menjadi beban bagi mereka, sehingga tidak mau mengikat diri lebih lama lagi dengan negara-negara pulau ini.

Namun beberapa kepulauan masih merupakan jajahan atau di bawah pengawasan negara-negara asing yaitu: Kepulauan Pitcairn (Inggris), Kepulauan Society, Tuamotu (Australia), Gamber dan Kepulauan Marquesas, Wallis dan Futuna serta Kaledonia Baru (Perancis), Tokelan, Kepulauan Cook (Australia), Kepulauan Carolina Marshall dan Mariana Utara, Guan dan Samoa Amerika (Amerika Serikat). Status pulau-pulau ini dimasa mendatang belum jelas. Di satu pihak Perancis masih berusaha mempertahankan status kepulauan jajahannya dan dipihak lain beberapa pulau masih sulit memilih kemerdekaan karena belum mampu untuk menjadi negara-bangsa sehubungan dengan kecilnya wilayah dan jumlah penduduk mereka.

Bersamaan dengan proses dekolonisasi ini, negara-negara Pasific Selatan berusaha untuk membentuk suatu kesatuan politik bagi masyarakat Pasific Selatan melalui integrasi bangsa. Negara-negara yang merdeka ini telah mendirikan organisasi-organisasi regional: Komisi Pasific Selatan (South Pasific Commission) dan Forum Pasific Selatan (South Pasific Form). Komisi Pasific Selatan didirikan berdasarkan persetujuan Canberra 1947 oleh Belanda, Australia dan Selandia Baru, sedangkan Forum Pasific Selatan didirikan pada tanggal 5 Agustus 1971 oleh Australia, Selandia Baru dan beberapa negara merdeka (Ronald Nangoi, 1982, h....).

Sebagai negara-negara yang baru merdeka, kondisi sosio-politik dan sosio-ekonomi masing-masing negara ini belum stabil. Mereka sangat tergantung pada bantuan negara-negara asing. SM Koya mengemukakan bahwa: di kawasan Pasific terdapat masalah rendahnya taraf pendidikan, tekanan kependudukan, masalah urbanisasi dan pengangguran serta kekurangan gizi. Kesulitan negara-negara ini tidak lepas dari keterbatasan hasil-hasil produksi. Mereka umumnya mendasarkan perekonomian mereka pada sektor pertanian dan industri primer. Ekspor terbatas pada hasil-hasil produksi pertanian berupa kopra, gula, pisang, minyak kelapa sawit, dan coklat dan hasil pertambangan seperti emas, tembaga, nikel dan fosfat.

Ketergantungan pada negara-negara industri maju bisa dilihat dalam bidang bantuan luar negeri dan perdagangan. Sejak kemerdekaan, mereka menerima bantuan luar negeri dari Inggris, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat, juga badan-badan internasional. Papua Nugini menerima bantuan dari Australia, Kiribeti dari Inggris, Kepulauan Solomon dari Inggris, Australia dan Selandia Baru, Tonga dari Inggris, Australia, Selandia Baru dan Bank Pembangunan Asia, Tuvalu dari Inggris, Samoa Barat dari Selandia Baru, Australia, PBB, MEE dan IMF. Perdagangan luar negeri yang merupakan sumber pendapatan negara masih tertuju pada negara-negara

industri tertentu terutama Australia dan Selandia Baru. Mereka tampaknya tidak bisa melepaskan keterikatannya dengan kedua negara ini. Walaupun menyadari ketergantungan ini, negara-negara Pasific Selatan tidak mau dianggap sebagai bagian Dunia Ketiga. Ratu Sir Kamisase Mara, Perdana Menteri Fiji mengatakan: “Pandangan terhadap bangsa Afrika tampaknya diterima seadanya dan ditujukan pada semua penduduk asli. Ini tidak berlaku bagi Pasific Selatan”.

Ringkasnya negara-negara Pasific Selatan tidak sama dengan negara-negara seperti Ghana, Tanzanis, atau Malaysis. Terdapat pendapat bahwa masyarakat Pasific Selatan memiliki taraf hidup yang lebih baik daripada negara-negara Dunia ketiga lainnya. R.K. Fisk dalam tulisannya: “Ekonomic, Social and Political Trends in the South Pasific in th 1980”, mengemukakan bahwa menurut ukuran umum, hampir seluruh rakyat Pasific berada (well-off), satu hal yang cukup menonjol dalam statistika. Dibandingkan dengan negara-negara miskin di Asia dan Afrika, negara-negara Pasifikjelas berada di luar kategori negara-negara miskin (Ronald Nangoi, 1982: 730).

Kehidupan serupa itu memberi itu memberi warna khusus kepada masyarakat Pasific Selatan. Mereka memang secara potensial memiliki kekayaan alam yaitu mineral dasar laut, perikanan dan bahan-bahan tambang seperti emas, nikel, dan fosfat. Kemajuan teknologi akan mempermudah penggarapan potensi sumber-sumber alam tersebut di kemudian hari. Masalahnya adalah apakah negara-negara Pasific Selatan ini mampu memanfaatkan kekayaan lautnya. Dengan demikian peranan negara-negara maju khususnya di bidang teknologi tidak bisa dilakukan, karena mereka memiliki teknologi dan juga membutuhkan sumber-sumber daya alam ini.

2. Keterlibatan negara-negara Asing di Kawasan Pasific Selatan.

Menurut pengalaman historis dalam perang dunia kedua, kawasan Pasific Selatan ini memang terlihat sebagai kawasan yang strategis. Karena itu tidak mustahil bahwa kawasan ini sekarang mulai merupakan ajang persaingan dan pertentangan ruang lingkup pengaruh dalam rangka politik global super power. Kondisi perekonomian di negara-negara kawasan ini masih sangat tergantung dari subsidi yang diberikan oleh bekas penguasa administrasi masing-masing dalam rangka membantu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi mereka. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi mereka, negara-negara di kawasan tersebut sangat

mengharapkan bantuan dari luar negeri, khususnya dalam mengadakan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial mereka (Sumaryo Suryokusumo, 1986: 63).

Kehadiran bahkan keterlibatan negara-negara luar di kawasan Pasific Selatan menjadi petunjuk bahwa kawasan ini merupakan salah satu kawasan penting di dunia. Negara-negara luar ini meliputi: Uni Soviet, Cina, Jepang, Amerika Serikat dan Perancis yang melibatkan diri dalam bentuk operasi kapal ikan, percobaan nuklir, hubungan diplomatik dan kolonialisme di kawasan ini. Kepentingan mereka umumnya berlainan satu sama lain.

a. Kehadiran uni Soviet di Pasific Selatan

Pada dasarnya kepentingan luar negeri Uni Soviet dilandasi oleh kepentingan nasional dalam rangka mengabdikan kepada ideologinya yaitu suatu kepentingan untuk menyokong gerakan kaum komunis di seluruh dunia. Untuk kepentingan ini, Uni Soviet tidak mengabaikan aspek sosio-ekonomi dan sosio-politik internasional, terutama keadaan kelas pekerja. Dengan demikian politik luar negeri Uni Soviet merupakan kombinasi antara usaha memperjuangkan masyarakat lemah atau kelas pekerja dengan kepentingan nasionalnya, sehingga dengan usaha ini Uni Soviet dapat memperoleh kekuatan global.

Di dalam mencapai perimbangan strategis dan kekuatan global, Uni Soviet menggunakan empat elemen kekuatan, dimana keempat elemen itu berjalan bersama-sama. Keempat elemen itu adalah: diplomasi, ekonomi, kebudayaan dan strategi militer. Dari keempat itu, strategi militer lebih diutamakan, karena strategi ini efektif. Strategi ini menggunakan lautan sebagai penyokong politik luar negeri Uni Soviet. Pihaknya dapat menempatkan armada-armadanya, sehingga efektifitas komunikasi strategi dapat terkontrol, disamping dapat menempatkan politik globalnya. Perkembangan armada laut Uni Soviet merupakan suatu aspek dan alat dari politik global demi merealisasi hegemoni komunis di dunia (Daoed Yoesoef, 1973: 88).

Uni Soviet mulai mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap negara-negara Pasific Selatan sejak awal dekade 1980an. Kawasan Pasific Selatan mulai diperhitungkan oleh Uni Soviet. Lebih-lebih kondisi politik negara-negara kepulauan Pasific Selatan sedang mengalami pergolakan. Kaledonia Baru, Fiji dan Solomon sedang mencari formasi politik. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk mempengaruhinya. Hal ini tampak jelas ketika Uni Soviet menawarkan jasa untuk mengembangkan perikanan, oceanografi dan hidrografi serta menunjukkan perhatian untuk proses penentuan diri di wilayah-wilayah jajahan Perancis. Oleh sebab itu

Australia juga mendesak Perancis untuk menarik diri dari Kaledonia Baru, karena khawatir bahwa pertentangan-pertentangan disana akan menjadi lebih tajam, sehingga membuka pintu bagi pengaruh Uni Soviet. Memang sejak semula, Australia bersikap memusuhi Uni Soviet dan tidak ingin melihat ekspansi negara itu di kawasan Pasific Selatan dan dunia terutama tetangganya (Ronald Nangoi, 1983: 731).

Pada bulan Mei 1984 Menteri Luar Negeri Australia Bill Heyden mengadakan kunjungan ke Moscow. Dari kunjungan Bill Heyden ini, Pemerintah Australia menginginkan agar peranan Uni Soviet di sektor ekonomi bersifat konstruktif dan positif. Kunjungan ini sangat berarti bagi Uni Soviet, sebab ia telah memperoleh pijakan ekonomi di Pasific Selatan. Posisi ini tidak disia-siakan oleh Uni Soviet untuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara kepulauan di Pasific Selatan. Tahap pertama, Uni Soviet mengadakan perjanjian penangkapan ikan dan pemberian hak kepada kapal-kapal Uni Soviet untuk singgah di Vanuatu (Suara Karya, 12 September 1984). Tahap-tahap selanjutnya, hampir secara berurutan Uni Soviet menjalin hubungan dengan Solomon dan Fiji yang sedang dilanda kemelut ekonomi.

Kehadiran Uni Soviet di kawasan Pasific Selatan ini disebabkan adanya kehadiran Amerika Serikat di kawasan ini, dimana Amerika Serikat telah lama menjalin hubungan yang erat dengan Australia dan Selandia Baru. Memang kehadiran salah satu negara adidaya di suatu kawasan, pasti akan menarik kehadiran adidaya yang lain. Dengan demikian kehadiran Amerika Serikat ini telah memaksa Uni Soviet untuk hadir di kawasan ini, misalnya di Solomon, Vanuatu, Fiji dan Karibati (Suara Karya, 12 September 1986).

Dari catatan sejarah, kepentingan-kepentingan ekonomi Uni Soviet secara cepat atau lambat pasti akan ditumpangi kepentingan politiknya. Bagi negara-negara kepulauan di Pasific Selatan, hal ini sudah merupakan resiko politik. Negara-negara seperti Vanuatu, Solomon, Fiji dan Karibati belum memperhitungkan sejauh itu.

Sampai akhir tahun 1986, perhatian Uni Soviet kepada Pasific Selatan lebih besar dibandingkan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Uni Soviet bersedia menarik kekuatan militernya, tetapi di Pasific Selatan, Uni Soviet justru menambah kekuatannya. Kekuatan armada Uni Soviet di kawasan ini sekitar 775 kapal, termasuk 90 kapal permukaan, 95 kapal selam serbaguna dan 39 kapal selam yang dipersenjatai nuklir". (Suara Karya, 12 September 1986)

Resiko politik bagi negara-negara Pasific Selatan itu muncul setelah Uni Soviet berusaha keras untuk mendidik para pemimpin muda di negara-negara ini.

Taktik politik Uni Soviet berusaha keras untuk mendidik para pemimpin muda di negara-negara garam ini. Taktik politik Uni Soviet ini bertujuan guna menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang loyal kepada Moscow (Suara Karya, 5 Maret 1947).

b. Kehadiran Cina di Pasific Selatan

Kehadiran riil Uni Soviet dalam bentuk operasi kapal-kapal ikan dan kapal-kapal penjelajah di samping pengembangan sayap komunisme ini telah mendorong musuh utamanya yaitu Cina untuk berperan aktif di kawasan ini (Ronald Nangoi, 1982: 737).

Semenjak hubungan Cina dan Uni Soviet putus, orientasi politik luar negeri Cina lebih diarahkan untuk membendung pengaruh Uni Soviet di kawasan Pasific. Langkah utama yang ditempuh Cina yaitu harus aktif di kawasan Asia-Pasific. Garis kebijakan ini diselaraskan dengan kepentingan ekonomi Cina guna membangun perekonomian di dalam negerinya, sehingga politik luar negerinya dapat menyokong pendapatan ekonomi, terutama kegiatan perdagangan dengan negara-negara tetangganya. Dalam hal ini Cina berusaha keras mendekati para pemimpin negara-negara tetangganya dengan strategi diplomasi.

Cina telah memperhitungkan Pasific Selatan sebagai kawasan alternatif bagi pasar ekonominya. Langkah pertama yang ditempuhnya adalah mendekati Australia dan Selandia Baru. Cina mempunyai alasan, bahwa Australia mempunyai barang yang dibutuhkan Cina, terutama gandum, uranium dan batubara. Alasan kedua Australia sangat berpengaruh bagi negara-negara di Pasific selatan. Apabila hubungan ekonomi Cina-Australia terjalin baik, maka Cina akan mudah menjalin hubungan dengan negara-negara di Pasific Selatan lainnya. Pihak Menteri Luar Negeri Australia Freeth mengakui bahwa jalinan kerja sama itu hanya terbatas pada hubungan dagang. Freeth selamanya berpendapat bahwa Cina akan membeli gandum kapan saja dia ingin membelinya (Justus Van der Kroef, 1973: 60).

Cina pernah melakukan percobaan peluru kendali antar benua (ICBM) di Pasific Selatan. Kedudukan Cina lebih beruntung daripada Uni Soviet karena negara ini mempunyai perwakilan antara lain di Fiji, Samoa Barat dan Papua Nugini. Bahkan Cina berusaha berbaik hati dengan negara-negara di Pasific Selatan, misalnya dengan menjanjikan akan melindungi Samoa Barat apabila diserang Uni Soviet (Ronald Nangoi, 1982: 737).

Kehadiran Cina di Pasific Selatan lebih lambat dalam memainkan posisi strategis globalnya. Walaupun terlambat, kehadiran Cina telah diterima oleh sebagian negara-negara Pasific Selatan, dan ini merupakan fasilitas yang penting bagi strategi global.

Walaupun kehadiran Cina di Pasific Selatan relatif masih kecil pengaruhnya, namun kehadiran Cina telah membuat risau Australia dan Selandia Baru mendesak Amerika Serikat untuk mengadakan detente dan deterrence kepada Cina. Deterrence ini sangat berguna dan penting bagi dimensi nuklir (Australia Foreign Affairs Record, Februari 1986: 111).

Australia dan Selandia Baru mendesak Amerika Serikat karena Amerika ikut bertanggung jawab atas ancaman yang datang dari Cina di Pasific Selatan. Dengan demikian akan mengurangi ancaman keamanan Pasific Selatan.

c. Kehadiran Jepang di Pasific Selatan

Jepang yang terletak di sebelah barat laut Samudera Pasific bukan merupakan pendatang baru di kawasan Pasific termasuk Pasific Selatan. Dalam Perang Dunia Pertama pada bulan Oktober 1914 Jepang menduduki beberapa pulau di Pasific, yaitu kepulauan Nauru dan Mikronesia. Tetapi dalam Perang Dunia kedua, Jepang terpaksa melepaskan pulau-pulau ini karena kalah perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengambil alih pulau-pulau ini. Sesudah itu Jepang tidak lagi berperan aktif dalam dunia internasional, karena Jepang harus membangun ekonomi dalam negerinya dan memperkokoh percaya diri bangsanya (Ronald Nangoi, 1982: 734)

Sejalan dengan perubahan situasi dunia, dewasa ini, Jepang yang telah menjadi raksasa ekonomi, mulai berperan aktif lagi dalam dunia internasional. Kehadiran kembali Jepang di kawasan Pasific Selatan dalam bentuk yang berbeda dengan masa lalu yaitu kerjasama ekonomi khususnya di bidang perikanan. Jepang kini sangat berkepentingan dengan perikanan di Pasific Selatan, sekitar 60% konsumsi makanan laut rakyat Jepang berasal dari Pasific Selatan. Jepang telah mengerahkan armada perikanannya di perairan Fiji dan mendirikan perlengkapan gudang regional, menunjang pabrik pengalengan ikan di Lovuka (ibukota Fiji yang lama). Kegiatan yang sama dilakukan Jepang di perairan Samoa, termasuk pengalengan ikan di Pago-Pago, Samoa Amerika.

Untuk memperkuat kehadirannya ini Jepang telah mengadakan kerjasama dengan beberapa negara di daerah-daerah yang strategis. Menurut Bhagwan Singh,

Jepang mengusahakan kepulauan Mana menjadi daerah pariwisata di Fiji. Di Tonga, perusahaan-perusahaan dagang Jepang mempunyai rencana untuk mengembangkan Pulau Vavau menjadi daerah liburan bagi pejabat-pejabat tinggi Jepang (Ronald Nangoi, 1982:734).

Dewasa ini Jepang mendapat sebutan sebagai Kreditor terbesar di dunia bagi negara-negara Pasific Selatan, dengan kebijakan lebih memperkuat kedudukan ekonominya dari pada militer. Maka pada tahun 1987 Menteri Luar Negeri Kurniari membentuk “South Pasific Task Force” untuk mengkoordinasi bantuan luar negeri terhadap negara-negara Pasific Selatan.

Akhir-akhir ini Jepang juga mendukung aliansi Pasific Selatan. Jepang mulai memberi bantuan untuk pertahanan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah konflik militer. Ia kemudian menandatangani konsep “Strategis Assistance”. Meskipun Perdana Menteri Kurinari hanya menunjukkan untuk memelihara stabilitas politik regional Pasific Selatan dan tidak untuk memperkenalkan ketegangan-ketegangan baru.

d. Kehadiran Perancis di Pasific Selatan

Bagi negara-negara Pasific Selatan, Perancis bukan merupakan pendatang baru. Satu-satunya negara yang masih berusaha mempertahankan kehadirannya sebagai kekuatan kolonial secara menyolok di Pasific Selatan adalah Perancis, sehingga ia bisa disebut sebagai negara kolonial pertama dan terakhir di kawasan ini. Negara-negara jajahan atau bekas jajahan Perancis terdiri atas: Kaledonia Baru, Polnesia Perancis, Wallis, Futuna dan Vanuatu (sebelumnya New Hebrides). Sampai saat ini Perancis berusaha untuk tetap bertahan di kawasan ini disebabkan adanya beberapa alasan yaitu:

- 1) Pulau-pulau atoll Polnesia Murora dan Fangataufa menjadi tempat-tempat percobaan senjata-senjata nuklir Perancis.
- 2) Kaledonia Baru merupakan sumber mineral yang paling berharga di Pasific Selatan, dengan cadangan nikel yang besar di dunia, cadangan-cadangan mineral lain dan sedang melakukan eksplorasi minyak lepas pantai.
- 3) Jajahan Perancis di Pasific Selatan adalah sekitar 22.600 km persegi, tetapi zona ekonomi 200 mil memperluasnya lebih dari 7 juta km persegi sehingga Perancis menjadi kekuatan maritim paling besar di Pasific selatan.

- 4) Teori domino masih berlaku di Perancis, artinya Paris takut jika ia memberikan kemerdekaan kepada kaledonia Baru, maka Polinesia akan segera menyusulnya (Ronald Nangoi, 1982:732)

3. Peranan Amerika Serikat di negara-negara Kawasan Pasific Selatan.

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II Amerika Serikat mengembangkan suatu politik luar negeri yang membawa Amerika pada kemakmuran nasional dan pengaruh dunia. Ada beberapa kunci elemen-elemen dari politik luar negeri ini antara lain:

- a. Dalam bidang keamanan, Amerika Serikat mengikuti doktrin kembar yaitu anti komunis dan politik yang mencegah suatu negara untuk memperluas dan mempengaruhi negara lain.
- b. Secara ideologi, Amerika Serikat mengumumkan bahwa Amerika Serikat lebih menyenangi politik liberal dan mendukung nilai-nilai demokrasi (Charles W. Yost, 1976:14).
- a. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat ini berkaitan erat dengan adanya Perang Dingin.

Perang Dingin adalah konflik antara negara-negara Barat yang dipelopori Amerika Serikat dengan negara-negara Komunis yang dipelopori Uni Soviet dalam masalah ideologi, ekonomi, politik dengan aksi-aksi militer yang terbatas. Istilah Perang Dingin seringkali digunakan untuk melukiskan keadaan yang terjadi sesudah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II usai, muncullah berbagai perselisihan. Wilayah yang pertama kali diperselisihkan adalah negara-negara Balkan. Hubungan Amerika-Soviet semakin memburuk sewaktu Amerika Serikat pada bulan Juni 1947 mengusulkan Rencana Marshall, suatu program yang bertujuan membantu pemulihan kembali Eropa dibidang ekonomi sebagai akibat perang. Sejalan dengan ahncurnya perekonomian Eropa, partai komunis berkembang pesat di Eropa. Eropa telah pecah menjadi dua kelompok, yaitu Eropa Barat yang pro Amerika Serikat dan pihak Eropa Timur di bawah pimpinan Soviet. Kedua belah pihak membangun persekutuan yang kuat. Perang Dingin mereda pada akhir tahun 1980an, ketika Gorbachev menjadi pemimpin tertinggi Soviet. Di bawah kepemimpinannya, ia membiarkan negara-negara Eropa Timur menjadi negara demokrasi dan meninggalkan komunis (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990:32).

Disamping itu, dengan berakhirnya Perang Dunia II, menandai kemunculan perang baru, yaitu perang ideologi komunis melawan ideologi non komunis. “Masing-masing negara pemenang memanfaatkan posisi dunia yang diperolehnya sehabis perang sebagai batu loncatan dalam memperluas ideologinya (Emil Salim,1986:3). Dengan demikian peta politik dunia terpecah menjadi dua yaitu satu sisi negara-negara yang berhaluan komunis mengelompokkan diri, dan di sisi lain telah muncul negara-negara yang berideologi non komunis. Oleh sebab itu tidak mengehrankan jika kedua kelompok ini saling beradu dalam memperebutkan pengaruh di negara-negara baru.

Telah diterangkan di muka bahwa sejak tahun 1960an sampai tahun 1980an banyak negara-negara Pasific yang terjajah menjadi negara-negara pulau yang merdeka. Perubahan status politik ini adalah akibat suatu proses dekolonisasi terutama di pulau-pulau yang mempunyai potensi untuk menjadi negara bangsa di Pasific. Proses dekolonisasi di kawasan ini sejalan dengan dekolonisasi mengenai penghapusan penjajahan di dunia.

Menurut pandangan Amerika, dekolonisasi ini dijalankan atas dasar pertimbangan politik, khususnya status politik negara-negara di Pasific Selatan. Di dalam perkembangan waktu, mereka ini (negara-negara di Pasific Selatan) banyak menimbulkan masalah, yang akhirnya akan merepotkan negara-negara induk (Harold Jacobson, 1964: 509). Dengan demikian negara-negara Induk seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru rela melepaskan negara-negara jajahannya, untuk mengurangi beban negara-negara induk, dan memberikan kesempatan kepada negara-negara yang merdeka tersebut untuk mengembangkan segala kemampuannya sehingga mereka tidak lagi menggantungkan diri kepada negara-negara induk. Oleh karena itu Amerika Serikat sangat mendukung adanya proses dekolonisasi negara-negara di Pasific Selatan.

Di negara-negara baru yang merdeka ini, tentu saja penjajah telah meninggalkan daerah jajahannya, akibatnya di negara-negara baru ini mengalami kekosongan kekuatan luar. Sehubungan dengan realitas luar ini, antara blok komunis dengan blok non komunis saling berebut untuk mendapatkan pengikut dan menanamkan pengaruh di negara-negara lain.

Perselisihan dan permusuhan itu di dalam lintasan sejarahnya melibatkan negara-negara baru tersebut. Sehingga secara tidak sadar negara-negara baru tersebut terseret dalam pertikaian. Akibatnya negara-negara baru itu terseret ke dalam

peperangan dalam bentuk baru, yaitu Proxy War. Proxy War adalah perang antar negara yang mewakili negara adidaya dalam pertengkaran ideologi (Emil Salim, 1986:4).

Pertarungan antara ideologi komunis dengan ideologi non komunis setelah Perang Dunia II ternyata mempunyai implikasi bagi Pasific Selatan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Uni Soviet dan Cina terhadap negara-negara di kawasan Pasific Selatan. Kehadiran Uni Soviet dan Cina di kawasan ini, walaupun yang tampak adalah kepentingan-kepentingan ekonomi, namun dibalik kepentingan ekonomi tersebut, kedua negara (Uni Soviet dan Cina) berusaha menanamkan pengaruh ideologi mereka yaitu komunisme dengan lamban dan sangat halus. Melihat gelagat yang dijalankan oleh Uni Soviet dan Cina tersebut, Amerika Serikat mulai waspada terhadap pengaruh komunisme di kawasan Pasific Selatan.

Sebenarnya sampai tahun 1970an, perhatian Amerika pada perkembangan negara-negara Pasific Selatan tidak begitu besar dibandingkan perhatian Amerika pada negara dunia ketiga lainnya. Hal ini disebabkan karena negara-negara kecil di kawasan Pasific Selatan dianggap belum begitu penting bagi kepentingan Amerika. Di samping itu di kawasan ini Amerika telah mempercayakan pada kedua sahabatnya yaitu Australia dan Selandia Baru. Rendahnya perhatian Amerika tersebut dimaksudkan agar Australia dan Selandia Baru memfungsikan negara-negara kecil tetangganya itu untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosialnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat tetap mempunyai kepentingan di kawasan ini, walau hanya berskala kecil. Amerika Serikat menunjukkan perhatian yang positif atas dekolonisasi dan perkembangan negara-negara kecil yang baru (Herr, 1978:224).

b. Peranan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi.

Telah disebutkan diatas bahwa perhatian Amerika Serikat di kawasan Pasific Selatan belum begitu besar dibandingkan perhatian Amerika pada negara-negara dunia ketiga yang lain. Namun sejak akhir tahun 1970an Amerika Serikat mulai menaruh perhatian yang besar pada kawasan Pasific Selatan ini karena kawasan ini dipandang mempunyai prospek global baik dalam bidang ekonomi, bidang politik maupun bidang strategi. Oleh sebab itu Amerika Serikat lebih memprioritaskan kawasan Pasific Selatan dari pada Eropa.

Seperti yang terlihat dari kehadiran Amerika Serikat di Kepulauan Mariana sebagai Trust Territories Amerika yang terletak di Kawasan Pasific Selatan yang dikuasai oleh Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dunia II (Raymond D. Denet

& Robert K Turner, 1949: 373). Hadirnya Uni Soviet dengan Cina di Pasific Selatan sebenarnya dikondisikan oleh kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini. Sebagai negara-negara yang baru merdeka perekonomian negara-negara di kawasan ini sedang mencapai tahapan perkembangan. Negara-negara Barat tidak mencoba memberi bantuan dalam jumlah yang memadai. Pada tahun 1985, misalnya jumlah bantuan resmi negara-negara Barat tidak mencapai 2% dari bantuan asing yang diterima oleh negara-negara Pasific Selatan. Oleh sebab itu tampaknya hanya bantuan ekonomi yang besar yang harus menjadi pilihan agar negara-negara Barat, khusus Amerika Serikat dapat mempertahankan pengaruhnya. Perhatian Amerika kepada negara-negara kepulauan di Pasific Selatan lebih difokuskan pada kontrak penangkapan ikan, terutama ikan tuna. Bagi negara-negara kecil di Pasific Selatan kekayaan lautan menjadi sumber utama dari konsumsinya.

Bagi Amerika, perdagangan ikan tuna dari negara-negara Pasific Selatan, bertujuan untuk membantu dan memperbaiki taraf hidup mereka yang masih rendah. Lebih-lebih kondisi politik dan ekonomi mereka rata-rata belum stabil, sehingga keadaan ini memaksa Amerika untuk memperhatikan dan memperjuangkan nasib mereka. Hasrat Amerika ini bertujuan agar mereka tidak jatuh ke tangan komunis. (J. Kusnanto Anggoro, 1987:188).

Di samping itu kepentingan ekonomi global Amerika di Pasific Selatan erat kaitannya dengan dimensi ekonomi nasionalnya. Hubungan bilateral Amerika dengan Australia lebih diformulasikan dalam berbagai bentuk yang menunjang perekonomian keduanya. Kedua pemerintah bersepakat untuk mengadakan perlindungan perdagangan di antara mereka, sehingga hal ini akan mempermudah efektifitas pasaran (Bill Heyden, 1987: 301). Mereka (Amerika dan Australia) memandang tindakan ini perlu dilakukan Amerika banyak mengimpor hasil pertanian, peternakan dan pertambangan. Bagi Amerika, impor yang paling penting dari Australia adalah uranium, batu bara dan nikel. Tentu saja hasil tambang ini dipergunakan untuk tenaga nuklirnya. Demikian pula hubungan Amerika dengan Selandia Baru sudah terjalin erat sejak Perang Dunia II. Kepentingan Amerika dengan Selandia Baru lebih dititik beratkan pada impor hasil pertanian dan peternakan. Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri Amerika banyak mengimpor susu, daging, wool, buah-buahan dan gandum.

Dengan demikian jalinan kerjasama antara Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru dalam bidang ekonomi sudah terjalin sejak beberapa dasawarsa.

Bahkan dapat dilihat dari angka ekspor ekonomi Australia dan Selandia Baru sejak tahun 1975 cenderung meningkat (Bill Heyden, 1987:29). Bagi Australia dan Selandia Baru Amerika merupakan mitra kerja baik dalam bidang ekonomi, politik dan strategi. Amerika juga memberi kepercayaan kepada Australia dan Selandia Baru untuk bertanggung jawab terhadap negara-negara kepulauan di Pasific Selatan.

Sejarah telah mencatat bahwa Australia berhasil mengintensifkan peranan ekonominya di kawasan Lautan Hindia dan Lautan Pasific. Sementara itu Selandia baru telah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di Pasific Selatan dan memonitor kegiatan negara-negara besar di Antartika (Australian Foreign Affairs Record, 1987: 295-297). Dengan demikian ekonomi global Amerika di kawasan Pasific Selatan bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi kawasan. Stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi akan lebih dinamik, sehingga negara-negara di kawasan ini dapat aktif dalam perdagangan internasional.

c. Peranan Amerika Serikat dalam bidang politik dan strategi di kawasan Pasific Selatan.

1) Dukungan Amerika terhadap proses dekolonisasi negara-negara kawasan Pasific Selatan.

Seperti telah disebutkan di muka bahwa Amerika Serikat menunjukkan perhatian positif atas dekolonisasi dan perkembangan negara-negara kecil yang baru. Dukungan terhadap proses dekolonisasi ini di samping untuk mengurangi beban politik negara-negara induk juga bermaksud untuk memberi peluang kepada negara-negara di kawasan Pasific Selatan guna mengembangkan kemampuan-kemampuannya sehingga mereka tidak lagi menggantungkan diri lagi kepada negara-negara induk. Amerika memberi dukungan terhadap proses dekolonisasi negara-negara di kawasan Pasific Selatan, maka Amerika bersedia untuk memperbaiki negara-negara yang bebas dan merdeka.

Adapun perbaikan Amerika dalam bidang politik yaitu Amerika wajib membimbing negara-negara di kawasan Pasific untuk mencari dan menetapkan sistem pemerintahan yang akan dipegang oleh mereka. Tentu saja Amerika Serikat menghendaki sistem demokrasi yang berlaku di negara-negara kawasan Pasific Selatan tersebut. Dalam Perang Dunia II antara Australia dengan Amerika sudah terjalin hubungan yang baik terutama pada masa invasi Jepang masuk ke kawasan Pasific Selatan, Amerika Serikat

berjasa dalam mengatasi invasi Jepang ini yang berakhir dengan kekalahan Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh Amerika Serikat.

Jalinan kerjasama yang baik ini berlanjut setelah berakhirnya Perang Dunia II, dimana pada tanggal 1 September 1951 dibentuk Pakta Pertahanan Pasific di San Fransisco. Pakta Pertahanan ini bernama ANZUS (Australia, New Zealand and United state of Amerika). Adapun tujuan dari pembentukan ANZUS ini adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan regional di Pasific. Anggota-anggota ANZUS telah sepakat bahwa di antara mereka harus saling membantu, sebab bahaya di satu pihak merupakan bahaya mereka (Australian Foreign Record, 1984: 685-686). Kehadiran Uni Soviet dan Cina di Pasific Selatan telah menggugah ANZUS untuk membuktikan bahwa ANZUS mempunyai tanggung jawab atas keamanan regional Pasific Selatan.

Tanggung jawab keamanan regional tersebut membuat ANZUS lebih aktif dan lebih kreatif dalam menghadapi perkembangan kawasan. Oleh sebab itu ANZUS selalu menjalin hubungan dengan negara-negara di Pasific Selatan. Di samping itu juga mempererat hubungan kolektif sesama anggota aliansi. Hubungan kolektif ini, secara strategis, mempermudah operasi ANZUS dalam kerjasama keamanan regional. Kemudian ini disebabkan karena: Di dalam kerangka kerja ini mengandung komunikasi langsung antar anggota ANZUS. Komunikasi ini diwujudkan dalam pertemuan-pertemuan tahunan Dewan ANZUS dan kunjungan para pejabat pemerintah. Di samping itu, di antara anggota ANZUS tersebut mempunyai kesamaan pandangan hidup, tradisi politik dan warisan budaya yang mempermudah hubungan di antara mereka. Kesamaan tersebut merupakan modal utama bagi ANZUS dalam melaksanakan program kerjanya. Kesamaan ini mempermudah pemecahan masalah yang dihadapi ANZUS, khususnya masalah stabilitas keamanan dan perdamaian regional.

Dan memang ANZUS telah menempuh berbagai strategi untuk membendung masuknya pengaruh komunis di Pasific Selatan. Strategi ANZUS tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Pasific Selatan. Penyesuaian ini dapat mengangkat penilaian mereka terhadap eksistensi ANZUS. Ini berarti kedudukan ANZUS di Pasific Selatan cukup memberi arti bagi negara-negara di kawasan Pasific Selatan.

Sehubungan dengan diselenggarakannya Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC) di kota Seattle wilayah Washington DC Amerika Serikat pada bulan November 1993 ini, Perdana Menteri Jepang Hosokawa dalam wawancaranya dengan wartawan Kompas mengatakan bahwa: kehadiran militer Amerika Serikat di belahan bumi ini memainkan peran sangat penting bagi stabilitas Asia Pasific (Kompas, 18 November 1993:15). Menurut penuturan seorang pejabat departemen Amerika mengatakan bahwa APEC adalah forum yang paling bisa diharapkan untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan di kawasan ini (Pasific Selatan) (Tempo, 20 November 1993: 46).

D. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pasific Selatan merupakan kawasan yang berada di lautan Pasific bagian selatan garis katulistiwa, yang terdiri dari negara-negara kecil seperti Fiji, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Kiribati, Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Samoa Barat, Selandia Baru, Tonga, Tuvalu, Vamatu dan Australia di samping negara-negara kecil yang lain. Karena letaknya yang strategis maka kawasan ini pada tahun 1960-an mulai diperhitungkan oleh negara-negara besar.

Pada tahun 1990-an, Tahun 1970-an dan tahun 1990-an banyak negara-negara di kawasan ini yang memproklamkan diri sebagai negara merdeka walaupun munculnya mereka sebagai negara merdeka juga atas jasa negara-negara Inggris, Amerika, Australia yang telah rela melepaskan negara-negara jajahannya. Kecuali Perancis yang sampai sekarang tetap mempertahankan Kaledonia Baru, kepulauan yang lain karena beberapa alasan.

Sebagai negara yang baru merdeka ternyata mereka belum mampu untuk berdiri sendiri. Walaupun negara-negara tersebut sangat potensial karena kekayaan alam dan kekayaan lautnya namun mereka belum mampu untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu mereka mengharapkan bantuan juga bimbingan dari negara-negara luar. Karena adanya kelemahan ini, merupakan peluang bagi negara-negara asing untuk memanfaatkan kehadirannya di kawasan ini.

Adapun negara-negara asing yang hadir di kawasan ini adalah: Jepang yang hadir dengan bantuan ekonominya, Cina juga hadir dengan kepentingan ekonomi dan sekaligus untuk kepentingan politiknya, Uni Soviet hadir di kawasan ini dengan

berbagai alasan ekonomi tapi jelas Uni Soviet akan menanamkan pengaruh komunisnya di kawasan Pasific Selatan. Kehadiran Amerika Serikat di Pasific Selatan ini justru merupakan benteng bagi masuknya pengaruh luar yang sangat membahayakan perdamaian dunia. Peranan Amerika Serikat di kawasan Pasific Selatan ini adalah dalam bidang ekonomi dan dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi Amerika Serikat memberikan bantuan dan memperbaiki taraf hidup mereka yang masih rendah.

Dalam bidang politik dan strategi Amerika Serikat bersama-sama dengan Australia dan Selandia Baru yang terikat dalam Pakta Pertahanan ANZUS berusaha untuk membendung masuknya pengaruh komunis yang datang dari Uni Dsoviet maupun dari Cina. Dengan demikian sebenarnya peranan Amerika di Pasific Selatan ini baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik dan strategi saling berkaitan erat yaitu untuk keamanan dan perdamaian regional di Pasific Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daoed Joesoef, (1973). *Dua Pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional*
Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Departemen Penerangan RI, (1985). *Negara-negara Kawasan Pasific Kepulauan*. Jakarta:
Direktorat Penerangan Luar Negeri Departemen Penerangan RI.
- Emil Salim (September 1986) “*Antara Pelor dan Pangan*”, Prisma: Tahun XV, No.9.
- Herr. R. A (Agustus 1978), “*Jimmy Carter and America Foreign Policy in the Pasific Island*,
Australian Autlook, Vol. 32, No. 2.
- Heyden, Bill (June 1987), “*Australia-US Relation Australian Foreign Affairs Recoed*, Vol.
58, No. 6.
- Jacobson, Harold R, (1965), *American’s Foreign Policy*, New York: Random House.
- J. Kusnanto Anggoro, (1987), *Dinamika Politik di Pasific Barat Daya*, Analisa, Th, XVI, NO.
2.
- Raymond Dennet and Robert K. Turner (1950), *Document on can Foreign Relation*, Vol. XI
Januari 1-December 31 1949, Connecticut, Princeton University Press.
- Ronald Nangoi, (1982), *Kawasan Pasific Selatan dan Kehadiran Kekuatan-kekuatan Asing*,
Analisa, Th. XI, No. 8 Agustus.
- _____, (1983) *Australia dan Kawasan Pasific Selatan*, Analisa, Th. XII, No. 4.
- Sumaryo Suryokusumo (1986), kerangka konseptional kerjasama Indonesia dengan Papua
Nugini, Australia dan negara-negara Kawasan Pasific Selatan, Jurnal Luar Negeri, No
. 4. Bandung, Badan Penelitian dan Pengembangan Luar Negeri.

Yost, W. Charles (1976) US Foreign Policy, A Public Foundation Report.

Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13 (1990), Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka.

Tempo, 20 November 1993

Merdeka, 20 Juli 1987.

Suara Karya, 12 September 1984.

Kompas, 18 November 1993